

TESIS

**“PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA BARAT DI MASA *COVID-19*”**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Oleh:

**MUNAWAR, S.H.
NIM: 2020112061**

DOSEN PEMBIMBING

- 1. Dr. Khairani, S.H., M.H**
- 2. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
Tahun 2023**

**PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT DI MASA *COVID-19***

**(Munawar, 2020112061, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 139 Halaman, 2023)**

ABSTRAK

Badan Pemeriksa Keuangan idealnya melakukan pemeriksaan secara langsung. Adanya aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait pembatasan interaksi pada kondisi *Covid-19* menyebabkan pencarian bukti dan fakta pertanggungjawaban yang terjadi dilapangan sulit didapatkan sehingga menjadi tantangan bagi BPK sebagai lembaga Negara yang melaksanakan fungsi auditif dalam penyelenggaraan Negara untuk memaksimalkan pemeriksaan yang dilakukan dengan jarak jauh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tentu saja ini menimbulkan isu hukum yang menarik untuk diteliti. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa Pandemi *Covid-19* dan bagaimana kendala-kendala dalam pemeriksaan dapat diatasi; (2) Bagaimana tindak lanjut terhadap kerugian negara yang ditetapkan oleh BPK terhadap penyalahgunaan wewenang atau ketidaksesuaian pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola anggaran *Covid-19*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan bersifat deskriptif analitis dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan melihat fakta tentang peranan BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada masa *Covid-19*. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi *Covid-19* dilakukan dengan cara *desk audit* atau *work from home/ office* untuk menghindari penyebaran virus *Covid-19*. Pada awal tahun 2021, pemeriksaan dilakukan secara normal dengan mengikuti protokol kesehatan. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dengan jarak jauh masih beresiko, terbukti dari pertanggungjawaban suatu kegiatan ataupun pengecekan fisik yang tidak maksimal. Selain itu, dalam peta jabatan BPK, komposisi level pemeriksa yang dibutuhkan dalam suatu pemeriksaan belum merata sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Tindak lanjut terhadap kerugian Negara yang ditetapkan oleh BPK terhadap penyalahgunaan wewenang atau ketidaksesuaian pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola anggaran *Covid-19* yang dinyatakan bukan kerugian Negara oleh Aparat Penegak Hukum dalam pengalihan anggaran *Covid-19* yang begitu besar menciptakan celah dalam penyelewengan peruntukan dana *Covid-19*. Menurut SPKN, BPK menetapkan kerugian negara yang dialami oleh pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Keuangan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, *Covid-19*.

**REGIONAL FINANCIAL AUDIT BY THE WEST SUMATERA PROVINCE
REPRESENTATIVE OFFICE OF THE AUDIT BOARD DURING
THE COVID-19 PERIOD**

*(Munawar, 2020112061, Master of Law Study Program, Faculty of Law,
Andalas University, 139 Pages, 2023)*

ABSTRACT

The financial audit agency ideally conducts direct inspections. The existence of regulations issued by the Government regarding restrictions on interactions in the condition of Covid-19 has made it difficult to obtain evidence and facts of accountability that occur in the field, which has become a challenge for the Audit Board of the Republic of Indonesia as a state institution that carries out an auditive function in administering the state to maximize inspections conducted remotely far from regional financial management in the Regional Government of West Sumatera Province. Of course this raises interesting legal issues to be studied. The problems in this research are (1) How is the implementation of certain audits on Regional Government financial management carried out by the Audit Board of Representatives for West Sumatera Province during the Covid-19 pandemic and how can the obstacles in the audit be overcome; (2) How to follow up on state losses determined by the BPK regarding the abuse of authority or accountability discrepancies carried out by the Regional Government of West Sumatera Province in managing the Covid-19 budget. This research uses a normative-empirical legal research method, which is a type of research that focuses on positive legal norms and is analytically descriptive in nature by paying attention to laws and regulations and looking at facts about the role of the BPK in conducting audits of state financial management during the Covid-19 period. Based on this research, it can be seen that the implementation of audits on Regional Government financial management carried out by the BPK Representative for West Sumatera Province during the Covid-19 pandemic was carried out by means of a Desk audit or work from home/ office to avoid the spread of the Covid-19 virus. At the beginning of 2021, the examination will be carried out normally by following the health protocol. The implementation of inspections carried out remotely is still at risk, as evidenced by the accountability of an activity or physical checks that are not optimal. In addition, in the BPK position map, the composition of the level of examiners required in an audit is not evenly distributed, which affects the effectiveness of the audit. Follow-up on state losses determined by the BPK regarding abuse of authority of accountability discrepancies committed by the Provincial Government of West Sumatera in managing the Covid-19 budget which were declared not state losses by law enforcement officials in diverting the Covid-19 budget which was so large it created loopholes in fraud allotment of Covid-19 funds. According to the SPKN, the BPK determines state losses suffered by a regional government.

Keywords: *Regional Finance, Supreme Audit Agency, Covid-19.*